

**DINAMIKA PEMEKARAN ACEH LAUSER ANTARA (ALA) DAN ACEH
BARAT SELATAN (ABAS) DALAM SPERPEKTIF MASYARAKAT
ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RISKI JUANDA

NIM.140801039

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemeritahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERITAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**DINAMIKA PEMEKARAN ACEH LEUSER ANTARA (ALA) DAN
ACEH BARAT SELATAN (ABAS) DALAM PERSPEKTIF
MASYARAKAT ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

RISKI JUANDA

NIM . 140801039

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/ Dimunagasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dr. Muji Mulia, M.Ag

NIP. 197403271999031005



Eka Januar, M.Soc.,Sc

NIP. 198401012015031003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

RISKI JUANDA

NIM. 140801039

Pada Hari/ Tanggal

Jum'at, 26 Juli 2019 M
di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Muji Mulia., MAg

NIP. 197403271999031005

Sekretaris,


Eka Januar., M.Soc., Sc

NIP. 198401012015031003

Penguji I,


Muhammad Thalal, Lc., M. Si., M. Ed

NIP. 197810162008011011

Penguji II,


Aklima, S.Fil.I., M.A.

NIP. 198810062019032009

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum

NIP. 197307232000032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Juanda

Nim : 140801039

Jenjang : Strata Satu (S1)

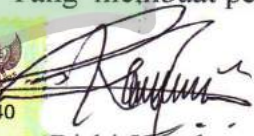
Jurusan/Prodi : Program Studi Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 16 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,




Riski Juanda
NIM. 140801039

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Dinamika Pemekaran Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) Dalam Perspektif Masyarakat Aceh Selatan”, ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat Aceh Selatan terhadap rencana pemekaran Provinsi ALA ABAS dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam wacana pemekaran Ala Abas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian lapangan. Informan penelitian ini terdiri tokoh politik, tokoh masyarakat dan masyarakat Aceh Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa wacana rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh Selatan terutama tujuan dibentuknya Provinsi ABAS, namun terkait faktor penyebab munculnya wacana pembentukan Provinsi ALA ABAS belum diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan para penggagasnya belum mensosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagian masyarakat Aceh Selatan tidak mendukung pembentukan Provinsi ALA ABAS. Hal ini dikarenakan ditakutinya akan terjadi perpecahan atau perang saudara sesama masyarakat Aceh serta merusak perdamaian Aceh yang telah disepakati dalam UUPA. Masyarakat Aceh Selatan juga berpandangan bahwa pembentukan Provinsi ALA ABAS hanya merupakan kepentingan elit politik semata serta tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Masyarakat Aceh Selatan juga berpandangan bahwa pembentukan Provinsi ALA ABAS hanya membuat wilayah Kabupaten Aceh Selatan lebih tertinggal, karena lokasinya tidak memungkinkan menjadi kawasan ibu kota provinsi. Pembentukan Provinsi ALA ABAS akan mengalami kendala terutama pemekaran tersebut berbenturan dengan UUPA yang berdampak terhadap kurangnya keseriusan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Minimnya dukungan pemerintah pusat ini terlihat dari penolakan usul inisiatif DPR RI tentang RUU pemekaran provinsi baru ALA ABAS. Selain itu kendala pemekaran Provinsi ALA ABAS dikarenakan adanya anggapan pemekaran ini akan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat pro pemekaran dan kontra pemekaran, termasuk juga faktor keterlambatan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Manusia.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci: *Persepsi, Masyarakat Aceh Selatan Pemekaran ALA dan ABAS*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberi rahmat serta karunianya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahilliyyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dinamika Pemekaran Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) Dalam Perspektif Masyarakat Aceh Selatan”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Demikian rasa hormat dan puji syukur diutarakan keharibaan-Nya dan kepada semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Ucapan terimakasih penulis kepada Ayahanda Alizar dan Ibunda Salmah yang tercinta berkat doa kasih sayang dan dukungan baik moril dan material sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr.,Muji Mulia.,M.Ag selaku pembimbing pertama dan Eka Januar.,M.Soc.,Sc selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih pula penulis sampaikan kepada seluruh Dosen dan asisten serta seluruh karyawan dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu bermanfaat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga, Ayahanda tercinta Alizar dan ibunda tersayang Salmah yang telah membantu saya untuk melanjutkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Yang telah memberikan bantuan berupa tenaga, doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Wassalam

Riski Juanda
NIM.140801039

DAFTAR ISI

	Halaman.
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.4. Kerangka Konseptual	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1. Landasan Teori dan Konsep	7
2.1.1. Teori Desentralisasi	7
2.1.2. Pengertian Persepsi.....	9
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	11
2.1.4. Bentuk-Bentuk Persepsi	12
2.1.5. Proses Terbentuknya Persepsi	14
2.2. Pengertian Dinamika	15
2.3. Pengertian Masyarakat	16
2.4. Pemekaran	20
2.5. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	26
 BAB III. METODE PENELITIAN	 29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Dasar dan Tipe Penelitian	30
3.4 Objek dan Subjek Penelitian	31
3.5 Sumber Data.....	32
3.1.1. Data Primer.....	32
3.1.2. Data Sekunder	32

3.6	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6.1.	Dokumentasi.....	32
3.6.2.	Wawancara	33
3.6.3.	Observasi	34
3.7	Teknik Analisis Data	34
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan	37
4.1.1.	Letak Geografis Kabupaten Aceh Selatan	37
4.1.2.	Wilayah Administratif Kabubupaten Aceh Selatan	37
4.1.3.	Keadaan Demografis Kabupaten Aceh Selatan	40
4.1.4.	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan	41
4.2.	Pandangan Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Pembentukan Provinsi ALA ABAS	43
4.2.1.	Persepsi Masyarakat Aceh Selatan Terhadap Wacana Pembentukan Provinsi Ala Abas Ditinjau Dari Aspek Tokoh Penggagas	43
4.2.2.	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Aceh Selatan Terhadap Wacana Pembentukan Provinsi Ala Abas	45
4.2.3.	Ditinjau Dari Aspek Sosial, Ekonomi dan Histori	45
4.2.4.	Ditinjau Dari Aspek Geografis.....	48
4.2.5.	Ditinjau Dari Aspek Politik.....	50
4.3.	Kendala yang Dihadapi Dalam Wacana Pembentukan Provinsi ALA ABAS	52
4.3.1.	Kendala Internal	52
4.3.2.	Kendala Eksternal	53
4.4.	Analisa Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
BAB V.	PENUTUP	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran-saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun daerahnya. Pembentukan daerah otonom dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding/ pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.¹ Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota.² Pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah.³ Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah Provinsi menjadi satu daerah baru.⁴

Berkaitan dengan pemekaran daerah, secara filosofis, bahwa tujuan pemekaran daerah ada tiga kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, memperpendek rentang kendali pemerintah. Munculnya peraturan perundang-undangan di atas memicu berbagai daerah untuk melakukan pemekaran wilayah yang salah satunya penulis melihat dinamika pemekaran wilayah Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan (ALA ABAS).

¹ Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

² Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

³ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁴ Herman Kombuno, Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Pemekaran Daerah*, No. 2, 2017, hlm. 4.

Sejumlah tokoh dari 11 kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam mendeklarasikan pembentukan Provinsi ALA ABAS pada 4 Desember 2005 di Jakarta. Aceh Leuser Antara terdiri dari lima kabupaten, yakni Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Sedangkan Aceh Barat Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Semeulue, dan Nagan Raya.

Tiga anggota DPR RI kelahiran Aceh Leuser Antara (ALA), Muslim Ayub, Irmawan, dan Salim Fakhry, menyampaikan bahwa pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan (ALA ABAS) merupakan jawaban dari percepatan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kawasan tengah tenggara, barat selatan, ingin mempercepat kemajuan, pembangunan merata, dan terciptanya keadilan politik dan ekonomi. Dan itu bisa dicapai dengan pemekaran kata Muslim Ayub, anggota Komisi III DPR asal Aceh yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR.⁵

Menurut Tagore Abubakar, Ketua DPRD Bener Meriah yang menjadi tokoh pembentukan provinsi baru itu, pendirian wilayah baru tak dapat ditunda lagi meskipun belum didukung pemerintah pusat. Pihaknya merasa pendapatan daerah yang dihasilkan tak sebanding dengan kesejahteraan warga di wilayahnya. Tidak maksimalnya perhatian Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Kota Banda Aceh dianggap menjadi penyebab utama. Upaya mewujudkan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara sendiri sudah berlangsung lama. Rancangan undang-undang (RUU) pembentukannya pun sudah dibuat. Namun, RUU itu memang sama

⁵ <http://aceh.tribunnews.com>. hanya-ala-abas-solusinya, (diakses pada tanggal 20 Mei 2019).

sekali belum disentuh DPR. Restu dari Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pun belum mereka dapatkan.⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, banyak hal yang melatar belakangi ALA ABAS sehingga menginginkan pemekaran Provinsi di antaranya yaitu adanya kesenjangan pembangunan infrastuktur yang dalam hal ini pembangunan Kabupaten Aceh Selatan lebih tertinggal dari kabupaten lainnya padahal Kabupaten Aceh Selatan termasuk salah satu kabupaten tertua sejak berdirinya provinsi Aceh. Hal ini juga menggambarkan adanya ketidakadilan yang merata. Selain itu sumber daya alam yang mampu mendukung ekonomi masyarakat juga membuat kawasan yang tergabung dalam ALA ABAS untuk yakin mampu berdiri sendiri.⁷

Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan adalah salah satu dari sekian banyak kabupaten yang ingin mencoba melakukan pemekaran seperti wilayah/daerah lain yang ada di wilayah Indonesia. Adapun daerah ini rencana dimekarkan menjadi Propinsi Aceh Lauser Antara (ALA) dan Propinsi ABAS (Aceh Barat Selatan). ALA terdiri dari Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Luwes, dan Bener Meriah. Sementara ABAS meliputi Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue.

Banyak faktor yang mendorong timbulnya rancangan pemekaran ALA ABAS seperti yang telah diuraikan di atas, membuat seluruh elemen masyarakat ALA ABAS menginginkan adanya pemekaran wilayah. Jika diperhatikan di lapangan dari beberapa faktor di atas, faktor yang paling kuat mendorong munculnya dorongan

⁶ Dua Provinsi Baru di Aceh Dideklarasikan, <www.liputan6.com/view.html>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2019).

⁷ Hasil observasi pada tanggal 10 Desember 2017

pemekaran ALA ABAS tersebut adalah faktor ketimpangan politik dan pembangunan infrastruktur. Sebenarnya jika pembangunan merata dan tidak adanya ketimpangan politik, mungkin tidak perlu ada pemekaran. Tapi fakta di lapangan ada ke tidak adilan pembangunan selama ini di Aceh, antara wilayah pantai timur dan utara dengan pantai barat selatan. Oleh sebabnya persoalan tersebut bagaikan tidak ada solusinya maka karena itulah rancangan pemekaran ALA ABAS selalu di tuntutan oleh masyarakat ALA ABAS kepada Pemerintah. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dinamika Pemekaran Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) Dalam Perspektif Masyarakat Aceh Selatan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan masyarakat Aceh Selatan terhadap wacana pembentukan Provinsi Ala Abas?
- b. Apa kendala yang dihadapi dalam wacana pembentukan Provinsi Ala Abas?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat Aceh Selatan terhadap rencana pemekaran Provinsi ALA ABAS.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam wacana pemekaran Ala Abas.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya mengkaji lebih jauh fenomena pemekaran wilayah di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Ala Abas.
- b. Kegunaan akademik dari hasil ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi penelitian-penelitian ilmiah, selanjutnya dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji masalah Otonomi Daerah terutama tentang masalah pemekaran.

1.4. Kerangka Konseptual

Wacana tentang pemekaran Provinsi ALA ABAS bukanlah hal baru lagi, gagasan ini dapat kita lihat dan selalu di suarakan pada saat momentum Pilkada dan juga Pilpres. Wilayah yang menjadi rencana pemekaran Provinsi ALA ABAS terdiri dari ALA terdiri dari Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Luwes, dan Bener Meriah. Sementara ABAS meliputi Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue. Yang menjadi fokus penulis untuk melakukan penelitian ini ialah terhadap masyarakat Aceh Selatan. Dimana penulis mencoba menggali tentang bagaimana dinamika, pandangan dan harapan masyarakat terhadap wacana pemekaran provinsi ALA ABAS tersebut.

Selanjutnya penulis mencoba mengemukakan defenisi/pengertian tentang apa itu dinamika, dalam kamus besar bahasa Indonesia dinamika dapat dilihat dari

beberapa bagian. Diantaranya kelompok, gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Pembangunan, gerak yang penuh gairah dan penuh semangat dalam melaksanakan pembangunan dan sosial, pergerakan masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.⁸



⁸ Diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/dinamika> 13 desember 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Desentralisasi

Teori Desentralisasi berawal dari konsep demokratisasi, karena salah satu tuntutan penting bagi sebuah sistem demokrasi adalah adanya pemencaran kekuasaan baik secara horisontal (kesamping), seperti lembaga tinggi negara yang sejajar, misalnya; DPR, MPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan KY, maupun pemencaran vertikal yang ditandai dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut *Lukman Hakim*, bahwa dalam tataran konsep, sudah sejak lama desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi.⁹

Menurut *Smith* dalam *M.R. Khairul Muluk*, bahwa biasanya Desentralisasi diasumsikan memerlukan demokrasi. Meski secara logis desentralisasi tidak membawa implikasi terhadap demokrasi, tetapi desentralisasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (seperti akuntabilitas penyediaan layanan publik, kesejahteraan, dan partisipasi) tetap memerlukan adanya demokrasi. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya demokrasi akan muncul para pengambil kebijakan sebagai wakil terpilih yang bertanggung jawab pada pemilih dalam kehidupan politik. Lebih lanjut *Smith*, mengatakan bahwa secara politis, desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, keterampilan politik, dan integrasi nasional. Tiga hal tersebut merupakan sesuatu yang hendak di capai pula oleh demokrasi. Desentralisasi membawa pemerintah untuk lebih dekat kepada masyarakat karena ia mampu

⁹Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Kesatuan*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 18.

meningkatkan kebebasan, persamaan, dan kesejahteraan. Desentralisasi memberikan landasan bagi partisipasi warga dan kepemimpinan politik, baik untuk tingkat lokal maupun nasional.¹⁰

Demikian halnya Muhammad Yamin, dalam Agussalim Andi Gadjong, mengatakan bahwa desentralisasi sebagai syarat demokrasi karena konstitusi disusun dalam kerangka negara kesatuan harus tercermin kepentingan daerah, melalui aturan pembagian kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan-badan daerah secara adil dan bijaksana sehingga daerah memelihara kepentingannya dalam kerangka negara kesatuan. Susunan yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintah ditingkat pusat dan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Disinilah di kemukakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang dapat membendung arus sentralisasi.¹¹

Dengan demikian hubungan antara desentralisasi dengan demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berbuat sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara.
- b. Desentralisasi menampung hak-hak demokrasi warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan di daerah.
- c. Dengan adanya desentralisasi, maka hak-hak politik rakyat akan tersalurkan dalam pemerintahan daerah.

¹⁰ M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, (Malang: Bayumedia Publishing dan Center For Indonesia Reform, 2006), hlm.13-14.

¹¹ M.Solly, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumini, 1982), hlm.155.

Sedangkan secara teoritis ada beberapa alasan di kembangkannya konsep desentralisasi ini yaitu:¹²

- a. Sebagai alternatif untuk pelayanan publik yang lebih efisien (konsep ini berkembang di negara-negara barat);
- b. Untuk menjawab masalah-masalah ketidak efisienan ekonomi, ketidak stabilan ekonomi makro dan tidak efektifnya pelaksanaan *good government*.
- c. Sebagai langkah alamiah menuju proses demokrasi (konsep ini berkembang terutama di negara-negara komunis);
- d. Karena tekanan politik (konsep ini berkembang dan terjadi di negara-negara Amerika Latin);
- e. Sebagai jalan menuju negara kesatuan (konsep negara-negara Afrika).

2.1.2 Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian, apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Tidak selalu berbeda, namun sering terdapat ketidaksepakatan.¹³ Sarlito W. Sarwono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang meniram stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang

¹² Siti Nurbaya, *Problematika Politik Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Desentralisasi di Indonesia, dalam Buku Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 340-341.

¹³ Meiyanto, *Persepsi, Nilai dan Sikap*, (Yogyakarta: UGM, 2012), hlm. 3

menggunakan alat pengindraan.¹⁴ Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.¹⁵

Menurut Mulyana persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut yang mempengaruhi kita. Dari penjelasan Mulyana ini dapat disimpulkan bahwa persepsilah yang menentukan kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lain.¹⁶ Menurut Walgito persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan disini merupakan suatu proses diterima dari stimulus oleh individu melalui alat penerimanya. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.¹⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu. Anggapan tersebut muncul setelah seseorang menerima informasi ataupun stimulus yang telah dialami sebelumnya untuk dijadikan suatu referensi dalam bertindak. Meskipun persepsi muncul secara disadari ataupun tidak disadari oleh seseorang. Persepsi merupakan proses yang didahului

¹⁴ Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 24.

¹⁵ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015, hlm. 121

¹⁶ Mulyana, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 167-168

¹⁷ Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 124

oleh penginderaan, dimana indera sebagai alat reseptor yang dimiliki oleh individu untuk menerima stimulus. Alat reseptor atau indera ini merupakan alat penghubung yang dimiliki oleh setiap individu yang digunakan untuk menghubungkan individu dengan dunia luarnya. Persepsi adalah stimulus yang diinderakan atau diterima oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti mengenai apa yang diinderakannya

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:¹⁸

1. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
2. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
3. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
4. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
5. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara

¹⁸ Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum...*, hlm. 103-106

satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Fatah Hanurawan mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (*the target*).¹⁹ Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dijelaskan bahwa yang menjadi kan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Keinginan yang tinggi juga semakin besar minatnya dalam memandang suatu objek atau peristiwa yang terkait. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Persepsi

Terdapat beberapa bentuk persepsi dalam psikologi, yaitu :

1. Penglihatan

Penglihatan merupakan indra manusia yang paling utama. Cahaya diterima oleh kedua mata dan difokuskan dengan sedemikian rupa di mana lalu diteruskan ke retina menurut arah datangnya sumber cahaya tersebut. Retina yang menangkap informasi ini lalu meneruskannya ke otak untuk diproses. /secara keseluruhan, ada sekitar informasi yang berbeda yang diteruskan melalui syaraf optik.

¹⁹ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial : Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 37-40.

2. Pendengaran

Syaraf pendengaran merupakan kemampuan untuk memberikan suatu pengamatan terhadap suara yang diterima melalui getaran udara. Frekuensi yang dapat didengar oleh manusia disebut sebagai audio. Frekuensi yang lebih tinggi dari ini dan tidak dapat terdengar oleh manusia dinamakan ultrasonic dan frekuensi yang berada di bawah rentang frekuensi ini dinamakan infrasonic. Sistem pendengaran manusia sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu telinga bagian luar yang mengumpulkan dan memfilter suara, telinga bagian tengah yang mengubah tekanan suara dan telinga bagian dalam yang menghasilkan sinyal syaraf untuk diproses oleh otak.

3. Sentuhan

Persepsi haptic merupakan proses untuk mengenali berbagai objek melalui sentuhan. Ini melibatkan kombinasi dari penginderaan dengan pola dan tekstur pada permukaan kulit manusia. Manusia dapat mengenal dan secara akurat mengidentifikasi objek dimensi melalui sentuhan. Ini melibatkan proses eksplorasi seperti menggerakkan jari melalui permukaan luar dari objek atau memegang keseluruhan objek di tangan.

4. Rasa

Rasa merupakan kemampuan untuk memberikan persepsi terhadap rasa dari suatu objek, termasuk tapi tidak terbatas pada makanan. Manusia menerima rasa melalui organ pengindra yaitu pengecap rasa yang terdapat pada permukaan lidah.²⁰

²⁰ Walgito, *Psikologi Sosial...*, hlm. 130-132

5. Sosial

Persepsi sosial merupakan bagian dari persepsi yang memperbolehkan manusia untuk memahami individu dan kelompok dalam dunia sosial mereka, sehingga merupakan bagian dari kognisi sosial.

6. Bicara

Persepsi dalam berbicara merupakan suatu proses dalam bahasa yang didengar, diinterpretasikan dan dimengerti. Riset dalam persepsi berbicara mencoba untuk memahami bagaimana manusia mendengar dan memahami suara yang berisi kata-kata dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk memahami bahasa yang diucapkan. Proses pemahaman akan bahasa ini dimulai dari tingkat suara di mana sinyal audio akan diproses seperti dalam pendengaran. Sinyal audio pada awalnya dibandingkan dengan informasi visual, paling utamanya adalah pergerakan bibir untuk mendapatkan petunjuk.²¹

2.1.5 Proses Terbentuknya Persepsi

Robbins sebagaimana dikutip oleh Puspita mengemukakan bahwa proses terbentuknya persepsi berasal dari beberapa faktor eksternal dan internal:

1. Pemilihan

Pada saat memperhatikan sesuatu berarti individu tidak memperhatikan yang lainnya. Mengapa dan apa yang disaring biasanya berasal dari beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari: (a) Ukuran, sesuatu yang besar maka akan lebih mudah menarik perhatian, (b) Kontras, sesuatu keadaan yang berlatar belakang kontras biasanya sangat menonjol. (c) Intensitas

²¹ Walgito, *Psikologi Sosial...*, hlm. 136.

kuatnya suatu rangsangan, contohnya suara keras di dalam ruangan yang sepi. (d) Gerakan, perhatian seseorang akan lebih tertarik kepada obyek yang bergerak untuk dilihat daripada obyek sama tapi diam. (e) Sesuatu yang baru. Obyek baru yang berada di lingkungan yang dikenal akan lebih menarik perhatian. Sedangkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya persepsi sebagai berikut: Pertama, Faktor fisiologis, seseorang yang distimulus oleh apa yang terjadi di luar dirinya melalui penginderaan seperti mata, kulit, lidah, telinga, dan hidung tidak semua memiliki kekuatan penginderaan yang sama. Kedua, Faktor psikologis, meliputi motivasi dan pengalaman belajar masa lalu.

2. Pengorganisasian

Pengelolaan stimulus atau informasi melibatkan proses kognisi, dimana individu memahami dan memaknai stimulus yang ada. Individu yang memiliki tingkat kognisi yang baik cenderung akan memiliki persepsi yang baik terhadap obyek yang dipersepsikan.

3. Interpretasi

Dalam interpretasi individu biasanya melihat konteks dari suatu obyek. Selain itu, interpretasi juga terjadi apa yang disebut dengan proses mengalami lingkungan, yaitu mengecek persepsi. Apakah orang lain juga melihat sama seperti yang dilihat individu melalui konsensus validitas dan perbandingan.²²

2.2 Pengertian Dinamika

Pengertiandynamika sosial adalah suatu bentuk gerakan yang berasal dari masyarakat yang sifatnya terus menerus, yang bisa menimbulkan terjadinya

²² Puspita, *Proses Persepsi Diri Mahasiswi Dalam Berbusana Muslimah*, Jurnal Pemikiran Islam Volume 41 Nomor 2, (Pekan Baru: Universitas Riau, 2017), hlm. 197.

perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dinamika dapat kita artikan sebagai sesuatu yang selalu bergerak. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda atau kondisi yang cenderung berubah-ubah atau tidak konstan. Istilah dinamika banyak digunakan dalam kehidupan karena sebagian besar hal yang terjadi di hidup ini bersifat dinamis. Dinamika terjadi karena adanya pengaruh baik dari luar maupun dari dalam yang membuat kondisi suatu hal menjadi berubah. Dalam bidang sosial, pengertian dinamika sosial adalah perubahan pada suatu masyarakat akibat sekelompok orang yang terus mengusahakan timbulnya suatu perubahan. Tanpa adanya kelompok seperti ini tentu kehidupan masyarakat tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Dinamika ini penting untuk diperhatikan dalam suatu perhitungan atau analisis. Sebabnya pada zaman yang semakin modern ini kondisi yang ada cepat berubah dari waktu ke waktu.²³

2.3 Pengertian Masyarakat

Sekumpulan hidup manusia atau masyarakat, dalam bahasa Inggris disebut "*society*" berasal dari bahasa latin "*socius*" yang berarti kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab "*syara*" yang artinya ikut serta atau berpartisipasi.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa dalam sebuah kelompok manusia yang telah bersepakat menyatukan diri menjadi sebuah komunitas yang disebut masyarakat, telah terdapat sebuah tatanan adat-istiadat yang mereka sepakati bersama yang sifatnya mengikat setiap individu yang ada dalam kelompok tersebut.

²³Diakses melalui situs www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-dinamika-menurut-para-ahli/ 08 Januari 2018.

Adat inilah yang pada gilirannya akan menjadi sebuah tatanan sosial dan budaya, yang menjadi warna dan ciri khas tersendiri untuk masyarakat tersebut.

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*society means a system of ordered relations*). Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil, misalnya, masyarakat kelompok etnis batak di Sumatera utara, atau suatu masyarakat yang lebih luas *Nation State* seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama dan etnis. Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungan dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu nilai :

- a. Kekuasaan (*power*)
- b. Kekayaan (*wealth*)
- c. Penghormatan (*respect*)
- d. Kesehatan (*well-being*)
- e. Kejujuran (*rectitude*)
- f. Keterampilan (*skill*)
- g. Pendidikan/penerangan (*enlightenment*)
- h. Kasih sayang (*affection*).²⁴

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 46-47.

Menurut Koentjaraningrat terdapat empat unsur/ ciri dalam masyarakat yaitu :

- a. Adanya interaksi antara warga-warganya.
- b. Adanya adat, norma, hukum, dan aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku.
- c. Suatu kontinuitas dalam waktu.
- d. Suatu rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga.²⁵

Selain istilah masyarakat dijumpai pula istilah komunitas (*community*) atau masyarakat setempat berarti suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Wilayah ini bisa berupa warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Komuniti yang menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal disuatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu sehingga faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar diantara anggota dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.²⁶

Interaksi yang terjadi di dalam biasanya terdapat ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya yang juga berfungsi sebagai ukuran untuk menggaris bawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis. Di samping itu, ada perasaan saling memerlukan dan bahwa tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya.²⁷ Perasaan demikian menurut Soekanto merupakan identifikasi dengan tempat tinggal yang dinamakan perasaan komuniti (*community centiment*) yang terdiri dari unsur-unsur:

²⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 181

²⁶ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hlm. 12

²⁷ Frank Teroriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 25

- a. Seperasaan, akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut.
- b. Sepenanggungan, setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan peranannya dalam kelompok dijalankan.
- c. Saling memerlukan, individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun psikologis.²⁸

Dari sejumlah definisi masyarakat tersebut di atas pada dasarnya mempunyai makna atau pengertian yang sama bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa hal yang bersifat prinsipil, antara lain sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama. Dalam hal ini tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur dalam waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati yang lainnya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama ini, timbullah interaksi atau sistem komunikasi yang melahirkan konsekuensi logis berupa peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30-34

- c. Adanya kesadaran bahwa mereka adalah suatu kesatuan dimana antara anggota di dalamnya terdapat ikatan sosial.
- d. Masyarakat adalah sebuah sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.²⁹

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masyarakat senantiasa merupakan suatu sistem, oleh karena mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan secara sosial.

2.4 Pemekaran

Pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi dan juga Kabupaten dan kota di Indonesia merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah yang bersumber dari asas desentralisasi yang dianut oleh bangsa Indonesia tak lain dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, perluasan ruang bagi pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam agar bisa lebih dinikmati masyarakat di daerah tersebut.

Secara konseptual pengertian pemekaran wilayah dapat dirumuskan sebagai serangkaian upaya untuk mewujudkan kesempurnaan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hlm. 37

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang memberikan definisi tentang pembentukan dan pemekaran daerah, bahwa Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemekaran daerah adalah pemecahan propinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.³⁰

Dari kedua pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan dan pemekaran daerah pada dasarnya adalah sama, yaitu lahirnya satu atau lebih daerah administratif dari satu daerah yang menjadi induknya. Perbedaannya hanya terletak pada sisi dari mana kita memandangnya. Istilah pemekaran daerah akan dipakai jika dilihat dari sisi daerah induk yang kemudian akan dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa daerah administratif, sedangkan istilah pembentukan daerah dapat dipakai jika melihat pada daerah baru hasil pemekaran tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, telah disebutkan dengan jelas sejumlah kualifikasi yang menjadi persyaratan pembentukan suatu daerah otonom. Pasal 4 ayat (2) PP ini menyebutkan bahwa: Pembentukan Provinsi, kabupaten/kota berupa pemekaran dan penggabungan beberapa Kabupaten dan juga

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

kecamatan yang bersandingan pada wilayah Provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.³¹

Pemekaran wilayah merupakan wujud pengakuan politik kepada kelompok masyarakat tertentu, yang mempunyai bahasa dan budaya sendiri. Pengakuan pemerintah pusat kepada masyarakat tertentu dalam batas wilayah tertentu merupakan pemberian kesempatan kepadanya untuk menjaga, mengembangkan bahasa, budaya, nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat.

Aspek yang paling mencolok mengenai proses desentralisasi sungguh tidak terencana. Pemekaran merupakan istilah Indonesia untuk menyebut subdivisi distrik-distrik dan Provinsi yang ada dalam rangka menciptakan unit-unit administratif baru. Pemekaran seperti itu juga terjadi di beberapa wilayah Negara-negara lain. Seperti di Amerika Serikat, pemekaran seperti itu disebut *redistricting*, yaitu pembentukan kembali distrik-distrik, dan juga menyangkut politik pemilihan.³²

Di beberapa Negara di Eropa Timur setelah era soviet berakhir, tujuannya adalah melepaskan penyatuan paksa dari era soviet dan kembali ke unit-unit semula yang lebih kecil. Baik di Amerika maupun di Eropa Timur proses itu tidak kontroversial. Di Indonesia pun, pergerakan primordial yang mementingkan daerah lokal menuntut wilayah administratif baru atas dasar argumen sejarah yang seringkali tidak jelas. Tujuan sebenarnya adalah menambah jabatan di birokrasi. Istilah Bahasa Indonesia “Pemekaran” yang secara harafiah berarti mekarnya bunga. Jelasnya, istilah ini sebenarnya merupakan sesuatu yang salah kaprah karena gerakan ini tidak mengarah keluar dan keatas melainkan justru kedalam dan kearah dirinya sendiri

³¹ Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

³² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah. Laporan Penelitian*, (Jakarta: Direktorat Otda Bappenas, 2007), hlm. 129

dalam bentuk subdivisi yang terus terjadi tanpa henti. Istilah yang mungkin lebih tepat, involusi administratif, sesuai pemikiran Geertz tentang involusi pertanian ketika begitu banyak orang sama-sama butuh menggarap sejengkal tanah yang sama. Pemekaran mencerminkan kemampuan yang sama melakukan improvisasi di saat-saat yang sulit.³³

Pemekaran adalah sebuah proses yang panjang, yang melibatkan usaha mengkampanyekan, melobi institusi-institusi dan orang-orang yang akan mengambil keputusan, dan prosedur-prosedur demokratis yang berkepanjangan. dalam literature terbaru mengenai desentralisasi di Indonesia, semua kasus pemekaran yang didiskusikan mengungkapkan kepentingan-kepentingan kuat dari para elit lokal, yang bertindak sebagai inisiator proses pemisahan, mengepalai komite-komite lobi, dan jika sukses menduduki jabatan-jabatan penting dalam provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten baru.³⁴

Pemekaran-pemekaran pada berbagai tingkatan pemerintah dewasa ini adalah suatu kebutuhan mendesak guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Walaupun tindakan pemekaran yang dilakukan tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan yang diatur oleh undang-undang.

Substansi pokok dalam penerapan politik desentralisasi adalah bagaimana mengatur pola distribusi urusan apa saja yang masih akan dilaksanakan sendiri oleh pusat dan urusan-urusan mana saja yang masih saja yang akan didesentralisasikan kepada daerah. Pengaturan tersebut akan selalu mengacu kepada pertimbangan historis, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan urusan tersebut.

³³Anies Baswedan, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV-Jakarta, 2007), hlm. 25-26.

³⁴Anies Baswedan, *Politik Lokal...*, hlm. 117-131.

Atas dasar itu, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan suatu daerah otonom berkaitan dengan penyelenggaraan urusan.³⁵

Pertama, cakupan wilayah pelayan pemerintah daerah. Cakupan wilayah pelayanan pemda menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu daerah otonom karena pemerintah daerah dengan cakupan wilayah yang sempit atau terbatas akan menghadapi masalah efisiensi dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dengan pertimbangan skala ekonomi. Penyelenggaraan urusan-urusan tertentu seperti urusan transportasi, persampahan, telekomunikasi, listrik, telepon, gas, air minum, dan sebagainya membutuhkan cakupan wilayah yang luas agar mencapai skala ekonomi sehingga dapat menekan biaya penyelenggaraan urusan biaya pelayanan.

Kedua, tujuan politisi dari pembentukan suatu daerah otonom. Untuk mencapai tujuan politisi pembentukan suatu daerah otonom secara efektif, yakni demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ³²dipersyaratkan pembatasan area pemerintahan daerah. Cakupan daerah yang terlalu luas akan menghambat tercapainya tujuan politis pembentukan suatu daerah otonom karena pemerintah daerah akan menjadi jauh dari masyarakatnya karena rendahnya intensitas hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Pada keadaan demikian kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi rendah dan akan mengakibatkan rendahnya akuntabilitas pemda dan memicu terjadinya praktek-praktek yang tidak baik.

Ketiga, karakter wilayah. Karakter wilayah juga menentukan apakah suatu daerah otonom perlu dibentuk atau tidak. Hal ini karena keberadaan Pemda adalah

³⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah. Laporan Penelitian...*, hlm. 130-131.

untuk melaksanakan jenis urusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dasar filosofisnya adalah bahwa pemerintah ada karena adanya rakyat. Legitimasi yang diperoleh pemerintah dari rakyat melalui pemilu mengisyaratkan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jenis kebutuhan rakyat tentu saja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana mereka tinggal. Konsekuensinya, jenis-jenis kewenangan maupun urusan Pemda bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Daerah dengan karakter perkotaan, seperti urusan air bersih, persampahan, pembangunan limbah, transportasi, dan sebagainya.³⁶

Keempat, bagi daerah perkotaan besaran kota juga menjadi pertimbangan bagi pembentukan satu daerah otonom kota. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk diatas satu juta jiwa membutuhkan kewenangan untuk menangani urusan yang berbeda dengan kota menengah dan kota kecil. Dari segi efisiensi, pemerintah kota metropolitan dianggap layak untuk menangani urusan tertentu karena pelayanan yang diberikannya akan dapat memenuhi kriteria skala ekonomi. Namun demikian, aspek demokrasi unit pemerintahan di kota metropolitan akan menjadi semakin kompleks dan semakin jauh dari aspirasi masyarakatnya. Dari aspek ekonomi, munculnya kota-kota metropolitan akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tersebut cenderung sering menimbulkan kesenjangan dalam pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Kelima, dari aspek batas wilayah, luas wilayah, luas area dan jumlah penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi batas-batas wilayah pemerintah

³⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah. Laporan Penelitian...*, hlm. 133.

daerah. Pertumbuhan penduduk akan mendorong perluasan pemukiman yang memiliki implikasi terhadap aspek ekonomi, politik, administrasi, dan wilayah kerja pemerintah daerah.³⁷

2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak terjadinya plagiasi terhadap kajian-kajian terdahulu, maka pada bagian ini diuarikan beberapa kajian terdahulu yang relevan. Kajian-kajian ini penting dijelaskan supaya diketahui persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti. Adapun kajian-kajian yang relevan di antaranya:

Kajian yang ditulis oleh Muttawali dengan judul *“Penggabungan Provinsi Usulan ALA dan ABAS Menjadi ALABAS (Studi Persepsi Mahasiswa Unsyiah yang berasal dari ALA dan ABAS)”*. Permasalahannya adalah bagaimana persepsi mahasiswa Unsyiah dari ALA dan ABAS terhadap penggabungan 2 Provinsi Usulan menjadi satu dan faktor apakah yang menghambat usulan pemekaran ALABAS (Aceh Leuser Antara dan Barat Selatan) menurut mahasiswa dari ALA dan ABAS. Data diperoleh melalui penelitian kualitatif dengan metode deskriptif didapatkan dari penelitian lapangan, wawancara dengan informan serta penelitian dokumentasi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan Mahasiswa yang berasal dari daerah ALA dan ABAS memiliki persepsi beragam mengenai isu penggabungan 2 Provinsi Usulan ini. Terdapat mahasiswa yang mendukung isu pemekaran ALA ABAS, dan ada pula yang menentang usulan pemekaran ini. Kebanyakan mahasiswa Unsyiah asal ALA

³⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah. Laporan Penelitian...*, hlm. 134

dan ABAS memandang wacana pemekaran ALA ABAS sarat dengan kepentingan politik, karena kehadirannya jelang momentum Pilkada Aceh 2017 dan Pemilu 2019. Penyebab pemekaran adalah karena permasalahan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan yang timpang di Aceh. Faktor yang menghambat usulan pemekaran menurut Mahasiswa dari ALA dan ABAS adalah pemekaran berbenturan dengan UUPA, kurangnya keseriusan pemerintah Aceh, pemerintah pusat, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan tim pengagas pemekaran kepada masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Aceh harus lebih banyak memperhatikan kondisi ALA dan ABAS.³⁸

Kajian relevan lainnya ditulis juga oleh Afrijal dengan judul *“Pandangan Masyarakat Aceh Jaya Terhadap Rencana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)”*. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS, faktor yang mempengaruhi munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS, serta tujuan pembentukan Provinsi ABAS. Munculnya rencana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dalam beberapa tahun terakhir sebagai provinsi baru di Aceh merupakan dinamika politik yang terjadi pada masyarakat Aceh sekarang ini. Kabupaten-kabupaten yang tergabung kedalam bakal Provinsi ABAS meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Simeulu, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Pembentukan Provinsi ABAS di pelopori oleh beberapa tokoh politik yang ada di lintas Barat Selatan. Masyarakat Aceh Jaya memiliki pandangan yang beragam terkait rencana pembentukan Provinsi ABAS, ada yang mengetahui dan

³⁸ Muttawali, *Penggabungan Provinsi Usulan ALA dan ABAS Menjadi ALABAS (Studi Persepsi Mahasiswa Unsyiah yang berasal dari ALA dan ABAS)*. Banda Aceh: Unsyiah, 2017), hlm. 1

mendukung tujuan pemebentukan Provinsi tersebut serta da juga yang tidak mengetahui dan mendukung rencana tersebut.

Faktor yang mempengaruhi munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS yaitu ketimpangan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam yang tidak maksimal serta minimnya keterwakilan pejabat struktural di Pemerintahan Aceh. Tujuan pembentukan Provinsi ABAS adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan aspek pembangunan infrastruktur dan membuka lapangan pekerjaan.³⁹



³⁹ Afrijal, *Pandangan Masyarakat Aceh Jaya Terhadap Rencana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)*. (Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2018), hlm. ii

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan metode penelitian ini akan diuraikan menyangkut aspek pendukung dalam metodologi penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang artinya sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴⁰ Metode deskriptif ini lebih memusatkan pada fakta yang sebenarnya dan peneliti langsung menuju ke lokasi untuk melihat, mengamati dan mendeskripsikan kondisi objek penelitiannya.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk dapat menemukan data yang spesifik tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Jadi pada prinsipnya penelitian yang dilakukan di lapangan ini yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat.⁴¹ Oleh karena itu deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode yang sistematis, yang bersifat nyata atau fakta tertentu, yang dilihat dari hasil penelitian atau lokasi penelitian.

⁴⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 47.

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 28.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 18 kecamatan yakni: Kecamatan Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Pasie Raja, Kluet Tengah, Kluet Utara, Kluet Timur, Kluet Selatan, Keude Timur, Bakongan, Keude Bakongan, Trumon Timur, Trumon Tengah, dan Trumon. Mengingat luasnya lokasi penelitian tersebut, maka penulis mengambil tiga kecamatan yang memiliki letak wilayah yang berbeda yaitu:

1. Kecamatan Tapaktuan (Wilayah Kota),
2. Kecamatan Sawang (Wilayah Pesisir),
3. dan Kecamatan Kluet Tengan (Wilayah Pegunungan).

Alasan penulis memilih ketiga kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian karena memiliki letak wilayah yang berbeda yang dapat mewakili kecamatan lainnya. Selain itu jumlah penduduk yang banyak, serta adanya indikasi ikut-ikutan di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang mana sebenarnya banyak masyarakat Aceh Selatan belum paham apa itu pemekaran ALA ABAS secara umumnya.

3.3. Dasar dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *deskriptif*, yang bertujuan memberikan gambaran (deskripsi) secara jelas tentang kelayakan pemekaran sebuah daerah berdasarkan aturan yang ada.

3.4 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁴² Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terhadap wacana pemekaran wilayah ALA ABAS.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁴³ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁴⁴

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁴⁵ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat, tokoh masyarakat dan politikus. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

⁴² Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.78.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

⁴⁴ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hlm. 92.

⁴⁵ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

3.5 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁶ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁴⁷ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan, teknik yang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

3.6.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan

⁴⁶ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...*, hlm. 132.

⁴⁷ *Ibid.* 132.

studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁴⁸ Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁹ Dengan wawancara ini peneliti dapat menggali data dan informasi yang akurat dari subjek penelitian mengenai Dinamika Pemekaran Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) Dalam Perspektif Masyarakat Aceh Selatan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tokoh Masyarakat
- b. Tokoh Agama

⁴⁸ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi Pertama, Cet ke 10, (Jakarta : Bumi Aksara), hlm 64.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R & D*, Cet Ke 21, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 140.

- c. Tokoh partai politik
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- e. Tokoh pemuda
- f. Organisasi Masyarakat (Ormas), yang ada di wilayah Aceh Selatan
- g. Tokoh pergerakan pembentukan Povinsi Ala-Abas.

3.6.3 Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.⁵⁰ Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan seperti keadaan penduduk, ekonomi masyarakat dan situasi politik di Kabupaten Aceh Selatan.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang ditemukan dari hasil observasi dan wawancara dengan cara menjabarkan dalam kategori, menyusun pola dan mengambil kesimpulan yang penting yang dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data juga merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁵¹ Adapun analisis data yang digunakan adalah:

⁵⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 143

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 34.

1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis di lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, pada saat observasi dan wawancara peneliti sudah dapat menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:

- a. Data Reduksi (*Data Reduction*), data yang diperoleh di lapangan sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Oleh karena itu perlu adanya data reduksi untuk merangkum dan memilih mana data yang penting dan pokok, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai.
- b. Penyajian Data (*Data Display*), setelah data direduksi selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat pola, tabel dan sejenisnya dari fokus masalah penelitian, agar data yang disajikan tersusun rapi dan saling berkaitan. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk memahami data yang telah didapatkan.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*), menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal akan berubah seiring dengan ditemukan bukti-bukti baru

dalam penyajian data. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal bersifat valid dan konsisten setelah peneliti turun ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵²



⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 245-252.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh selatan

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat Selatan dengan Ibukota Kabupaten adalah Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.185,56 Km² atau 418.556 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24"-030 44' 24" LU dan 960 57' 36"-970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah dibelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya.⁵³

4.1.2 Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (Delapan Belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 desa atau gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas: Kecamatan, Mukim, dan Gampong. Sebahagian besar wilayah terdiri dari daratan dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari hutan berbukit-bukit dengan

⁵³Sumber: BPS Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka, 2018

kemiringan curam sampai terjal. Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan luas perkecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah	
			Mukim	Gampong
1	Trumon	44.065	2	12
2	Trumon Tengah	43.285	2	10
3	Trumon Timur	32.509	1	8
4	Bakongan	7.883	2	5
5	Kota Bahagia	18.645	2	10
6	Bakongan Timur	19.582	1	7
7	Kluet Selatan	11.463	3	17
8	Kluet Timur	45.992	2	7
9	Kluet Utara	7.370	3	19
10	Pasieraja	10.037	2	20
11	Kluet Tengah	78.951	1	13
12	Tapaktuan	10.203	2	15
13	Samadua	10.666	4	28
14	Sawang	19.781	4	15
15	Meukek	46.533	4	22
16	Labuhan Haji	5.383	3	16
71	Labuhan Haji Timur	9.448	2	11
18	Labuhan Haji Barat	8.904	3	13
Kabupaten Aceh Selatan		418.556	43	248

Sejak isu pemekaran wilayah dikumandangkan oleh pemerintah pusat seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Aceh Selatan telah mengalami dua kali pemekaran. Pertama, pemekaran sabahagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Singkil yang meliputi Kecamatan Simpang Kiri, Simpang Kanan, Pulau Banyak, dan Singkil. Kedua, Pemekaran bahagian lainnya dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya yang meliputi

Kecamatan Manggeng, Tangan- tangan, Blang pidie, Susoh, Kuala Batee, dan Babahrot.



Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup Kawasan Andalan pesisir pantai Barat Selatan Provinsi Aceh, dimana sebahagian besar dan kawasan pemukiman diperkotaan berbatasan langsung dengan laut dan pesisir pantai Barat-Selatan. Bentuk dan pola pemukiman yang linier dengan jalan utama (Kolektor Primer) telah menghubungkan Kabupaten Aceh Selatan mulai dari jalur jalan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat), Jeuram (Kabupaten Nagan Raya), Blangpidie (Kabupaten Aceh Barat Daya), Tapaktuan, Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan) hingga ke daerah- daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis kedudukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan tersebut memiliki arti penting dan strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya serta stabilitas ketertiban dan keamanan.

4.1.3 Keadaan Demografis Kabupaten Aceh Selatan

Kependudukan merupakan faktor penentu perekonomian karena penduduk tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai sasaran pembangunan terutama dalam hal investasi pendidikan yang merupakan posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, oleh sebab itu pendidikan juga merupakan alur tengah dari seluruh sektor pembangunan, dimana salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dari penduduk itu sendiri. Oleh karenanya pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitasnya guna menunjang kegiatan pembangunan.

Perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan angka yang fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sepanjang tahun 2013-2017, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata 0,91 persen per tahun. Angka pertumbuhan ini tergolong sedikit lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk Provinsi Aceh sebesar 0,47 persen per tahunnya.



Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarka Lapangan Pekerjaan

No	Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian	41.740
2.	Manufaktur	882
3.	Jasa	43.610
	Total	86.232

Sumber: Kabupaten Aceh selatan Dalam Angka, 2018.

Seiring dengan terjadinya tranformasi perekonomian daerah maka profesi penduduk yang berkeja sebagai petani juga sudah mulai menurun. Sementara penduduk yang bekerja pada sektor jasa dan manufaktur relatif meningkat jumlahnya dalam proporsi penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi ini menunjukkan sektor pertanian tidak lagi dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Selatan.

4.1.4 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan

Menurut BPS penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.⁵⁴

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2019

Berdasarkan metode ini, maka garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh selatan dapat dilihat dalam berikut ini.

Tabel 4.3
Penduduk miskin kabupaten Aceh Selatan

No	Tahun	Garis kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
1	2013	172.427	52.400	26,98
2	2014	186.227	47.500	24,58
3	2015	196.167	49.800	24,72
4	2016	203.761	38.820	19,40
5	2017	236.741	35.410	17,50
6	2018	257.640	32.200	15,93

Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase penduduk miskin yang semakin berkurang. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Aceh Selatan sebesar 26,98 persen atau 52.400 jiwa, turun menjadi 19,40 persen pada tahun 2016 dan 15,93 persen atau tinggal sebesar 32.200 jiwa pada tahun 2018. Secara faktual berdasarkan data-data tersebut mengindikasikan juga bahwa pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan tersebut di Kabupaten Aceh Selatan. Angka Garis Kemiskinan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan juga meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat guna memenuhi pengeluaran minimum penduduk untuk makanan dan non makanan.⁵⁵

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2019

4.2 Pandangan Masyarakat Aceh Selatan Terhadap Wacana Pembentukan Provinsi Ala Abas

4.2.1 Persepsi Masyarakat Aceh Selatan Terhadap Wacana Pembentukan Provinsi Ala Abas Ditinjau dari Aspek Tokoh Penggagas.

Pemekaran Provinsi Aceh menjadi dua provinsi dengan adanya wacana pembentukan provinsi ALA ABAS yang terdiri dari beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Simelue dan Aceh Jaya di pantai barat dan selatan Aceh telah memunculkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, khususnya yang terdapat di dalam koridor pemekaran tersebut, yang salah satunya ialah masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Adanya keinginan pemekaran ini tidak bisa dilepaskan dari para tokoh penggeraknya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bintara Yakob salah satu elit politik penggagas adanya pemekaran wilayah tersebut, bahwa:

Beberapa tahun yang lalu kita ketahui bahwa adanya wacana pembentukan Provinsi di bagian Aceh Barat Selatan sebagai provinsi baru di Aceh. Setahu saya hal ini tidak terlepas dari dinamika politik. Munculnya tuntutan pembentukan Povinsi ALA ABAS yang terpisah dari Provinsi Aceh ini di pelopori oleh beberapa tokoh elit politik yang ada di lintas Barat Selatan. Para elit politik tersebut merupakan tokoh-tokoh yang sebelumnya pernah menduduki jabatan di dalam pemerintahan misalnya Tjut Agam mantan Ketua DPRK Aceh Barat periode 1999-2004, T. Sukandi mantan anggota DPRK Aceh Selatan, Adnan NS mantan anggota DPD RI Periode 1999-2004 dan masih banyak lagi para tokoh-tokoh yang tergabung ke dalam tim pembentukan bakal Provinsi ALA ABAS.⁵⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pandangan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terhadap wacana pembentukan provinsi baru di Aceh yakni ALA ABAS sangat setuju terutama di kalangan tokoh politik yang tergabung dalam Provinsi Aceh seperti DPRK dan DPR RI. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

⁵⁶Wawancara: Bintara Yakob, Elit Politik Penggagas Pemekaran ALA ABAS Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 1 Juni 2019

beberapa orang tokoh politik dan pejabat pemerintahan di antaranya T. Sukaradi selaku mantan anggota DPRK Aceh Selatan. Sekalipun melibatkan berbagai kalangan tokoh politik, proses pemekaran provinsi ini membutuhkan waktu yang lama karena harus melakukan berbagai pertemuan diplomasi baik di tingkat provinsi Aceh sendiri maupun di tingkat nasional. Perjuangan yang besar ini tidak membuat masyarakat berpersepsi buruk, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Hasyim yang merupakan masyarakat bahwa:

Saya sekali bagian masyarakat yang aktif dalam pemerintahan meyakini dan mendukung rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS tidak akan berhenti. Hal bisa kita lihat dimana perjuangan ini sudah di mulai sejak tahun 2003, dua tahun setelah itu tepatnya tahun 2005 Provinsi ALA ABAS dideklarasikan oleh Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) yang di ketuai Tjut Agam. Perjuangan untuk mendirikan Provinsi ABAS mengalami pasang turun hingga sekarang ini. Para KP3 ABAS bahkan sudah beberapa kali ke Jakarta untuk melobi Pemerintah Pusat agar secepat mungkin untuk merealisasikan pembentukan Provinsi ABAS. Mekanisme untuk membentuk Provinsi baru sudah dipenuhi oleh KP3 ABAS, namun terkendalanya sampai sekarang Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum menyetujui terhadap pembentukan provinsi baru di Aceh.⁵⁷

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Kabupaten Aceh terhadap wacana serta upaya pembentukan provinsi yang baru di pantai Barat Selatan Aceh memberikan keyakinan suatu keyakinan akan terwujud. Keyakinan masyarakat Aceh Selatan ini dikarenakan upaya serius di kalangan tokoh politiknya yang juga berjuang dengan serius dalam pembentukan Provinsi ALA ABAS tersebut.

⁵⁷Wawancara: Abdul Hasyim, Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 3 Juni 2019

4.2.2 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Aceh Selatan Terhadap Wacana Pembentukan Provinsi Ala Abas

Pembentukan wacana berdirinya provinsi ALA ABAS tidak hanya diketahui oleh kalangan masyarakat atas, hal ini tidak hanya diketahui oleh kalangan masyarakat atas, melainkan berita adanya wacana pemekaran wilayah Barat Selatan sudah diketahui oleh hampir seluruh masyarakat Aceh Selatan dari kalangan bawah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Abizal selaku masyarakat Aceh Selatan, yakni sebagai berikut:

Saya sudah lama mengetahui rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS ini. Saya mendapatkan pemberitaan yang di muat di berbagai media seperti koran Harian Serambi Indonesia yang menjadi media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap isu pembentukan Provinsi ABAS dan media sosial lainnya. Bahkan saya juga pernah mendapatkan berita pemekaran wilayah ini dari cerita-cerita masyarakat sekitar serta para tokoh politik.⁵⁸

Bertolak dari ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Selatan berkeinginan untuk mencari tahu wacana pemekaran tersebut. Hal ini sebagai tanda adanya persepsi baik berupa dukungan masyarakat akan pembentukan Provinsi ALA ABAS. Masyarakat tidak hanya mencari informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut, melainkan adanya upaya untuk memperolehnya dari berbagai media sosial seperti koran dan sebagainya.

4.2.3 Pemekaran Ditinjau dari Aspek Sosial, Ekonomi dan History

Persepsi masyarakat terhadap pembentukan provinsi baru ini tidak hanya sekedar pengetahuan saja, melainkan adanya berbagai alasan yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan baik secara ekonomis, sosial, historis dan

⁵⁸ Wawancara: Abizal, Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 3 Juni 2019

sebagainya. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Aidil Aifa selaku masyarakat Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

Saya sangat mendukung jika adanya pembentukan Provinsi ALA ABAS yang terpisah dari Provinsi Aceh. Hal ini supaya dapat meningkat kesejahteraan masyarakat yang ada di lintas Barat Selatan. Dengan adanya pemekaran, maka pembangunan akan lebih cepat berjalan terutama dalam bidang ekonomi masyarakat seperti perkebunan, pertanian dan lain sebagainya.⁵⁹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa adanya dukungan penuh dari masyarakat Aceh Selatan terhadap pembentukan Provinsi ALA ABAS. Dengan adanya pemekaran tersebut akan masyarakat beranggapan akan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Tujuan pemekaran sebagai mana yang katakan oleh sebagian masyarakat di atas, hanya keinginan yang diharapkan oleh masyarakat Aceh Selatan, namun tujuan adanya wacana pemekaran Provinsi ALA ABAS secara politik dan pemerintahan sama sekali masyarakat belum mengetahuinya. Hal ini terbukti dari keterangan yang disampaikan oleh Razali sebagai berikut:

Saya dan sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Tapaktuan ini tidak mengetahui tujuan yang konkrit dari adanya wacana pembentukan provinsi ALA ABAS tersebut, karena selama adanya wacana tersebut tidak ada sosialisasi dari tokoh-tokoh pejuang dan para penggagas pemekaran ALA ABAS. Hal ini membuat saya kurang sepakat terhadap pembentukan provinsi baru tersebut.⁶⁰

Dari keterangan di atas menunjukkan tidak semua masyarakat Kabupaten Aceh Selatan menginginkan adanya pemekaran Provinsi ALA ABAS. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak diberikan informasi secara jelas oleh pihak penggagas berdirinya terkait tujuan dan maksud pemekaran tersebut. Inilah yang menjadi faktor sebagian masyarakat kurang memberikan dukungan terhadap

⁵⁹Wawancara: Aidil Aifa, Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 4 Juni 2019

⁶⁰Wawancara: Razali, Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 4 Juni 2019

kebijakan pemekaran tersebut. Padahal setiap pembentukan daerah baru tentu dukungan dari masyarakat yang ada di daerah yang akan menjadi daerah otonom sangat di perlukan. Pembentukan provinsi ABAS, secara umum masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan tidak mendukungnya.

Adanya pandangan yang kurang mendukung terhadap pemekaran Provinsi ALA ABAS dari masyarakat Kabupaten Aceh Selatan disebabkan adanya kecemasan masyarakat akan menimbulkan perpecahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sadri bahwa:

Menurut saya wacana pemekaran pembentukan Provinsi ALA ABAS ini kurang baik. Karena akan memecah belah masyarakat Aceh yang sudah lama hidup bersama-sama dalam satu wilayah.⁶¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya alasan historis yang membuat masyarakat tidak mendukung adanya pemekaran Provinsi ALA ABAS. Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Aceh telah meninggalkan banyak kenangang dan persamaan pandangan dalam membangun Aceh. Tidak hanya alasan sejarah yang sudah dijalin sejak lama, penolakan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terhadap pembentukan Provinsi ALA ABAS juga karena alasan perjuangan politik yang sudah lama dilakukan secara bersama-sama dengan kabupaten lainnya, khususnya terkait pemberian daerah istimewa kepada Aceh. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Akmal Rahmadi selaku masyarakat Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

Bagi saya alasan utama tidak mendukung pembentukan Provinsi ALA ABAS karena sampai dengan saat ini Pemerintah Pusat belum membuat peraturan tentang keistimewaan Aceh, di khawatirkan apabila Provinsi ALA ABAS terbentuk, maka tidak akan mendapat keistimewaann dari Pemerintah Pusat

⁶¹Wawancara: Sadri, Tokoh Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 3 Juni 2019

tersebut, jadi perjuangan para pendahulu mulai dari DI/TII hingga GAM akan tersia-siakan di kawasan yang menjadi bagian dari Provinsi ALA ABAS yang ingin dibentuk.⁶²

4.2.4 Pemekaran Ditinjau dari Aspek Geografis

Alasan geografis juga menjadi adanya persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat Aceh Selatan terhadap pembentukan Provinsi ALA ABAS terutama terkait penetapan ibu kota provinsi. Jika terbentuknya Provinsi ALA ABAS maka Aceh Selatan sudah tentu bukan menjadi sasaran utama untuk dijadikan sebagai ibu kota provinsi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Akmal Rahmadi bahwa:

Kalaupun nanti Pemerintah Pusat menyetujui pembentukan Provinsi ALA ABAS, saya selaku masyarakat tidak menginginkan Kabupaten Aceh Selatan bergabung dengan Provinsi ALA ABAS tersebut. Hal ini dikarenakan letak ibukotanya nanti sudah pasti di kabupaten lain seperti Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan sebagainya. Hal ini mengingat Kabupaten Aceh Selatan letak wilayahnya di perhujung kabupaten yang tergabung dalam Provinsi ALA ABAS.⁶³

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa adanya penolakan masyarakat terhadap pembentukan Provinsi ALA ABAS dengan dalih kurang menguntungkan bagi Kabupaten Aceh Selatan itu sendiri terutama dalam penetapan wilayah ibukota provinsi yang ingin dibentuk. Tidak hanya aspek kesejahteraan sosial, histori dan ekonomi, penolakan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terhadap wacana pembentukan Provinsi ALA ABAS, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Murdi salah satu kepala desa di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

Bagi saya Provinsi ALA ABAS tidak layak didirikan menjadi sebuah provinsi baru di Aceh. Di khawatirkan pembentukan provinsi ALA ABAS ini hanya akan memperparah kondisi masyarakat sekarang. Apa lagi jika di

⁶²Wawancara: Akmal Rahmadi, Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 6 Juni 2019

⁶³Wawancara: Akmal Rahmadi, Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 6 Juni 2019

tinjau dari berbagai aspek baik itu potensi daerah, infrastruktur dan lain sebagainya Provinsi ALA ABAS belum memadai. Masih banyak pertimbangan yang harus di perhatikan ketika ingin membentuk Provinsi baru.⁶⁴

Keterangan di atas menunjukkan adanya kekhawatiran dalam masyarakat Aceh Selatan terhadap pembentukan Provinsi ALA ABAS terutama mengingat wilayah kabupaten-kabupaten yang akan dijadikan menjadi provinsi ini kurang memiliki potensi baik dari aspek SDM, Infrastruktur maupun sumber daya alam. Hal inilah yang juga menjadi alasan masyarakat berpandangan kurang mendukung atas pembentukan provinsi ini. Tidak hanya sebagai kekhawatiran tersebut, bahkan rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS dalam anggapan masyarakat Aceh Selatan juga akan membawa dampak negatif yakni dikhawatirkan akan terjadinya perang saudara antara sesama masyarakat Aceh, seperti yang dikemukakan oleh Candra sebagai berikut:

Menurut saya jika pembentukan Provinsi ALA ABAS ini jadi terbentuk maka ditakutkan akan terjadinya perang saudara yang secara otomatis akan mengakibatkan masyarakat Aceh akan terkotak-kotak dan masyarakat tidak sepaham lagi. Nanti masing-masing daerah akan memperjuangkan daerahnya masing-masing. Kekhawatiran ini sangat beralasan bahwa dari dulu hingga sekarang pemikiran orang Aceh tetap satu, jangan hanya karena untuk memperoleh kekuasaan masyarakat yang menjadi imbasnya.⁶⁵

Bertolak dari ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa kurangnya dukungan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan akan pembentukan Provinsi ALA ABAS dikarenakan dikhawatirkan akan terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya konflik-konflik yang tidak diinginkan. Hal ini akan membawa kerusakan perdamaian Aceh yang sudah berjalan selama ini. Kesepakatan

⁶⁴Wawancara: Murdi, Kepala Desa Keceamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 8 Juni 2019

⁶⁵ Wawancara: Candra, Pemuda Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 8 Juni 2019

perdamaian yang terjadi pada tahun 2005 di Helsinki Finlandia antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia merupakan satu upaya yang di tempuh kedua belah pihak untuk menghentikan konflik yang berkepanjangan di Aceh.

4.2.5 Pemekaran Ditinjau dari Aspek Politik

Pembentukan Provinsi ABAS melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (UUPA), karena di dalam UUPA yang merupakan turunan dari MoU Helsinki di atur jelas tentang masalah perbatasan Aceh. Apabila Provinsi ABAS di setuju oleh Pemerintah Pusat maka otomatis UUPA harus di revisi karena perbatasan Aceh sudah berubah hal inilah yang tidak diinginkan, UUPA itu harga mati tidak boleh diinterupsi oleh siapapun.

Wacana pembentukan Provinsi ALA ABAS ini juga membuat masyarakat Aceh Selatan berpersepsi bahwa semua keinginan ini hanya permainan para elit politik yang menginginkan keuntungan sendiri dan kelompoknya. Persepsi semacam ini disampaikan oleh Razikin selaku Tokoh Partai Politik bahwa:

Rencana pembentukan Provinsi ABAS merupakan permainan elit politik untuk memperoleh kekuasaan di dalam dunia perpolitikan di Aceh. Lihat saja kebanyakan tokoh yang ingin mendirikan Provinsi ALA ABAS merupakan mantan-mantan pejabat yang pernah merasakan nikmatnya menjadi birokrat pemerintahan yang hidup dengan segala kemewahan. Sekarang tokoh-tokoh penggagas Provinsi ALA ABAS tidak lagi menduduki kursi pemerintahan. Oleh karena itu ingin secepatnya membentuk Provinsi ALA ABAS sehingga nantinya yang menduduki jabatan penting sudah pasti tokoh-tokoh tersebut. Bagi saya pembentukan Provinsi ALA ABAS hanya kepentingan elit politik semata dengan mengatasnamakan masyarakat.⁶⁶

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pandangan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan atas wacana pembentukan Provinsi ALA ABAS bukanlah semata-mata

⁶⁶ Wawancara: Razikin, Tokoh Politik Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 9 Juni 2019

untuk kepentingan masyarakat umum, melainkan adanya pihak-pihak yang tidak mendapatkan lagi kedudukan di pemerintahan menginginkan kedudukan yang lebih baik.

Sekalipun banyak masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang berpandangan bahwa rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS akan berdampak negatif, namun kebijakan wacana ini jika terealisasi akan bisa membawa dampak positif misalnya dibukanya lapangan pekerjaan bagi penanggungan-pengangguran yang ada di kawasan Barat Selatan. Jika diperhatikan selama ini banyak sekali masyarakat menganggur karena tidak ada pekerjaan. Sehingga angka kemiskinan di Aceh terus meningkat setiap tahunnya, minimal angka pengangguran akan berkurang.

Pembentukan Provinsi ABAS tidak bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di lintas Barat Selatan, bahkan nanti bukan kesejahteraan yang di dapatkan masyarakat tetapi kesengsaraan yang lebih parah dari sekarang ini. Namun menurut keterangan Razikin bahwa sosialisasi terhadap rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS sangat di perlukan, agar masyarakat yang ada di wilayah Barat Selatan mengetahui terhadap rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS. Realita yang terjadi sekarang ini para penggagas Provinsi ALA ABAS belum melakukan sosialisasi tentang akan di bentuknya Provinsi ALA ABAS khususnya di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS ini disinyalir demi kepentingan elit politik semata untuk memperoleh kekuasaan. Kalaupun ada sosialisasi itu hanya sebatas ketika tatap muka saja.⁶⁷

⁶⁷Wawancara: Razikin, Tokoh Politik Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 9 Juni 2019

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Aceh Jaya mengetahui terhadap rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS, masyarakat mengetahui tujuan di bentuknya ALA ABAS, tetapi masyarakat tidak mengetahui faktor munculnya rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS karena tidak ada penjelasan lebih lanjut terutama dari para tokoh-tokoh politik yang ingin mendirikan Provinsi ALA ABAS. Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan secara umum tidak mendukung terhadap rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS bahkan masyarakat menilai Provinsi ABAS tidak layak didirikan karena belum saatnya Provinsi ALA ABAS di bentuk. Padahal secara peraturan perundang-undangan upaya pembentukan Provinsi ALA ABAS sudah dirancang oleh para tokoh pendirinya.

4.3 Kendala yang dihadapi dalam wacana pembentukan Provinsi Ala Abas

Secara umum kendala pembentukan provinsi Ala Abas dapat kategorikan ke dalam dua bentuk yakni kendala internal dan eksternal.

4.3.1 Kendala Internal

Kendala internal yang dimaksud dalam kajian ini ialah kendala yang berasal dari Kabupaten Aceh Selatan itu sendiri, baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, Sumber Daya Alam dan sosial budaya.

Keadaan sosial terutama sumber daya manusia masyarakat Aceh Selatan masih rendah, hal ini dapat ditandai tingkat pendidikan masyarakat rata-rata masih tamatan SMA dan bahkan sebagian hanya tamatan SMP bahkan ada yang tidak tamat

SD. Pendidikan yang rendah tentu akan mempersulit pembangunan provinsi ALA ABAS terutama dalam mengelola administrasi pemerintahan yang akan dibentuk.⁶⁸

Potensi sumber daya alam juga belum menjanjikan untuk mampu hidup menjadi sebuah provinsi baru bagi ALA ABAS. Aceh Selatan yang penghasilannya terfokus pada sektor pertanian belum mampu membiayai kehidupan masyarakatnya, sekalipun telah ditemukan beberapa pertambangan, namun masyarakat belum mampu mengelolanya dengan baik.⁶⁹

4.3.2 Kendala Eksternal

Wacana dan usulan pembentukan provinsi ABAS di Aceh mendapat tantangan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama Gubernur NAD Irwandy Yusuf serta sebagian besar elit politik di pemerintah pusat Aceh. Dalam hal ini Irwandy Yusuf melalui surat No. 125/1996 tanggal 23 Januari 2008 yang ditujukan kepada ketua DPR-RI, Agung Laksono, menolak pemekaran Provinsi ABAS karena bertentangan dengan MoU Helsinki. Dalam MoU Helsinki telah disebutkan dengan jelas tentang batasan kepada batas wilayah Aceh dan merujuk kepada batas wilayah Aceh tahun 1956 yang daerahnya itu membentang dari Sabang sampai dengan wilayah Tenggara dan timur Aceh yang berbatasan dengan wilayah Sumatra Utara. Wilayah Aceh tersebut dikenal dengan istilah "*Aceh Lhee Sagoe*". Selanjutnya Irwandy menambahkan, jika DPR RI tetap mengagendakan RUU pemekaran ALA dan ABAS maka

⁶⁸ Wawancara: Razikin, Tokoh Politik Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 9 Juni 2019

⁶⁹ Wawancara: Razikin, Tokoh Politik Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 9 Juni 2019

akan dapat mengganggu keamanan dan kedamaian yang sudah terwujud di aceh sejak ditandatanganinya MoU Helsinki.⁷⁰

Selain itu Tim pemantau MoU Helsinki (*MoU Helsinki Wach*) juga menolak rencana pembahasan usul inisiatif DPR RI tentang RUU pemekaran provinsi baru ABAS. Di sisi lain menurut koordinator umum MoU Helsinki Wach, M. Nur Djuli, usulan pemekaran provinsi baru ini akan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat pro pemekaran dan kontra pemekaran. Di samping itu Mukhlis Mukhtar, Ketua Komisi A DPRA dalam harian *Jawa pos* mengatakan bahwa keterlambatan pembangunan ekonomi yang menjadi alasan kuat pemekaran di wilayah ini sebenarnya tidak hanya terjadi di daerah pantai barat selatan saja, akan tetapi sesungguhnya juga terjadi di belahan bumi aceh yang lain seperti pesisir timur aceh maupun wilayah aceh bagian tengah dan tenggara.⁷¹

Usulan pembentukan provinsi ALA dan ABAS sudah sempat dimasukkan dalam agenda pembicaraan di DPR RI pada tahun 2004, tetapi usulan tersebut tidak sempat dibahas karena pergantian Anggota DPR RI yang telah habis masa jabatannya periode 1999-2004. Kemudian usulan tersebut masuk kembali ke DPR RI melalui usul inisiatif yang di bahas dalam rapat paripurna DPR RI pada hari selasa, 22 januari 2008. Pada saat itu anggota DPR RI Fraksi PBR (Partai Bintang Reformasi), Zainal Abidin Huseein menginterupsi rapat dan mengatakan sikap tidak setuju terhadap pembentukan provinsi ALA dan ABAS. Usulan pembentukan tersebut menurut beliau sudah kadaluarsa karena diusulkan sebelum disahkannya UU Pemerintah Aceh (UU-PA). Interupsi tersebut telah mementahkan kembali usulan

⁷⁰ M.Sahlan Hanafi, "Konflik Pemekaran wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Perjanjian Helsinki". *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, No. 1, Mei 2013, hlm. 230-231.

⁷¹ M.Sahlan Hanafi, Konflik Pemekaran..., hlm. 231.

pembentukan provinsi ALA dan ABAS dan pimpinan rapat sidang Soetardjo Soerjogoeitno menyerahkan kembali ke Komisi II DPR RI.⁷²

Selanjutnya dalam rapat konsultasi pimpinan dan perwakilan fraksi-fraksi komisi II DPR RI dengan menteri dalam negeri RI Mardianto, Selasa (27/05/2008) malam, hanya menyepakati untuk membahas 12 calon daerah otonom Kabupaten/Kota. Hal ini berarti calon provinsi ALA dan ABAS tidak memiliki peluang untuk dibahas pada tahun 2008. Menurut Nasir Djamil, di Komisi II DPR RI pada saat sekarang ini ada 50 RUU calon daerah otonom. Ada sejumlah 12 daerah yang telah mendapat amanat Presiden (Ampres), 15 daerah masih di meja Presiden dan selebihnya masih dalam proses penyelesaian di Komisi II DPR RI. Calon provinsi ALA dan ABAS masuk dalam kategori yang masih dalam proses penyelesaian di Komisi II DPR RI.⁷³

Pada bahasan kendala apa yang mungkin akan dihadapi setelah bergabungnya dua provinsi tersebut diperoleh berbagai macam jawaban menurut mahasiswa Unsyiah dari ALA dan ABAS. Dalam pembuatan kebijakan pemekaran daerah ALABAS dari provinsi Aceh maka pihak yang terlibat/stakeholders secara langsung adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPD-Aceh), Pemerintah Aceh (dalam hal ini Gubernur Aceh), DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) dan Ditjen Otda (Direktorat Jendral Otonomi Daerah) sebagai perwakilan pemerintah pusat. Sedangkan pihak yang tidak terlibat secara langsung adalah partai politik lokal Aceh, pentolan GAM dan masyarakat Aceh keseluruhan-

⁷² Tabloid Berita *Kontras*, No. 422, Th. X, 31 Januari- 6 Pebruari 2008.

⁷³ M.Sahlan Hanafi, "Konflik Pemekaran wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Perjanjian Helsinki". *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, No. 1, Mei 2013, hlm. 232-233.

nya. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat, termasuk dalam pihak intelektual yang tidak terlibat secara langsung tapi turut mempengaruhi.⁷⁴

Menurut masyarakat Aceh Selatan kendala yang akan dihadapi setelah bergabungnya dua provinsi tersebut adalah pemekaran berbenturan dengan UUPA, kurangnya keseriusan pemerintah Aceh, kurangnya keseriusan pemerintah pusat, hingga kurangnya sosialisasi mengenai pemekaran kepada masyarakat. Kendala lain yang akan dihadapi setelah bergabungnya dua provinsi tersebut, tidak hanya bersumber dari eksternal kebijakan, namun juga bersumber dari internal kebijakan pemekaran itu sendiri. Internal kebijakan bermakna berasal dari tim pengagas pemekaran itu sendiri. Tim pengagas dianggap kurang representatif, karena didominasi oleh tokoh-tokoh ALA.⁷⁵ Selain itu baik menurut masyarakat dari ALA dan ABAS, menyarankan agar tim pengagas lebih serius melaksanakan lobi-lobi politik ke stakeholders terkait dan meningkatkan sosialisasi kebijakan pemekaran ke masyarakat, sehingga akan meningkatnya simpatisan yang mendukung pemekaran dan hilangnya stigma “elitis” dalam kebijakan pemekaran yang didengungkan.⁷⁶

4.4 Analisa Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa pembentukan Provinsi ALA ABAS sudah layak didirikan menjadi sebuah daerah otonom. Bakal Provinsi ALA ABAS sudah memenuhi persyaratan salah satunya syarat fisik yakni cakupan wilayah. Cakupan wilayah minimal 5 (lima) kabupaten untuk mendirikan provinsi baru yakni Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya,

⁷⁴ M. Sahlan Hanafi, “Konflik Pemekaran wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Perjanjian Helsinki”. *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, No. 1, Mei 2013, hlm. 232-233.

⁷⁵ Wawancara: Razikin, Tokoh Politik Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 9 Juni 2019

⁷⁶ Wawancara: Razikin, Tokoh Politik Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 9 Juni 2019

Aceh Barat, Simelue dan Aceh Jaya. Pertimbangan syarat fisik saja tentu belum cukup untuk mendirikan Provinsi ABAS. Masih banyak persyaratan lain yang harus di penuhi oleh bakal Provinsi ABAS yang akan menjadi satu daerah otonom seperti potensi daerah, kemampuan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Apabila nanti Provinsi ABAS tidak bisa mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan daerah yang ada di lintas Barat Selatan maka Provinsi ABAS di anggap tidak mampu menyelenggarakan hak otonominya. Jika Provinsi ABAS tidak mampu menyelenggarakan hak otonominya maka akan di hapus atau di gabung kembali dengan Provinsi Aceh.

Masyarakat yang tidak menyetujui Kabupaten Aceh Selatan bergabung Provinsi ALA ABAS. Letak calon ibukota Provinsi ALA ABAS menjadi salah satu alasan terhadap tidak setuju Kabupaten Aceh Jaya bergabung dengan Provinsi ALA ABAS. Selain itu adanya isu Kabupaten Nagan Raya akan menjadi ibukota Provinsi ALA ABAS selain letaknya yang sangat strategis, dari segi infrastruktur Kabupaten Nagan Raya lebih mendukung seperti adanya infrastruktur transportasi udara yakni Bandara Tjut Nyak Dhin yang bertaraf nasional, adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menjadi salah satu PAD provinsi dan infrastruktur lainnya yang bisa menjadi faktor pendukung untuk menjadi calon ibukota Provinsi ALA ABAS.

Masyarakat menilai pembentukan Provinsi ABAS bisa membawa dampak negatif yakni merusak perdamaian Aceh dan akan terjadi perang saudara antar sesama masyarakat Aceh. Pembentukan Provinsi ABAS ini hanya kepentingan elit politik semata untuk memperoleh kekuasaan dengan mengatasnamakan masyarakat.

Walaupun begitu masyarakat menilai pembentukan Provinsi ABAS juga bisa membawa dampak positif yakni tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Masyarakat menilai Pembentukan Provinsi ALA ABAS tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pendapat masyarakat yang menyatakan pembentukan Provinsi ABAS bisa membawa dampak positif. Pertimbangannya dalam perspektif masyarakat yang dikatakan kesejahteraan masyarakat yakni memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari terpenuhi. Padahal jika dilihat dari makna kesejahteraan masyarakat bahwa memiliki pekerjaan merupakan salah satu ciri masyarakat yang sejahtera.

Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan umumnya mereka menilai pembentukan Provinsi ABAS melanggar UUPA, di dalam UUPA diatur batas wilayah Aceh. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 di mana sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Padahal jika di lihat di dalam UUPA tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang larangan untuk membentuk provinsi baru di Aceh. Namun karena masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Selatan umumnya tidak menginginkan adanya revisi terhadap UUPA tersebut.

Para penggagas Provinsi ALA ABAS tidak mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Padahal sosialisasi sangat penting agar masyarakat mengetahui terhadap rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS dan dengan adanya sosialisasi dari para penggagas maka masyarakat akan lebih

mengetahui terhadap tujuan di bentuknya Provinsi ALA ABAS, sehingga masyarakat tidak menganggap rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS ini kepentingan para tokoh-tokoh tersebut untuk memperoleh kekuasaan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

Pandangan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terhadap wacana rencana pembentukan Provinsi ALA ABAS beragam, bahwa masyarakat mengetahui rencana pembentukan Provinsi ABAS, mengetahui tujuan di bentuknya Provinsi ABAS, tidak mengetahui faktor munculnya Provinsi ABAS, tidak mendukung pembentukan Provinsi ABAS, tidak layak berdirinya Provinsi ABAS, tidak menyetujui Kabupaten Aceh Jaya bergabung dengan Provinsi ABAS, akan perang saudara sesama masyarakat Aceh, merusak perdamaian Aceh, Provinsi ABAS hanya kepentingan elit politik semata, akan membawa dampak positif, tidak bisa mensejahterakan masyarakat, melanggar UUPA, serta pengagas tidak mensosialisasikan bakal Provinsi ABAS kepada masyarakat.

Kendala yang dihadapi terkait wacana pembentukan provinsi ALA ABAS adalah pemekaran tersebut berbenturan dengan UUPA, kurangnya keseriusan pemerintah Aceh, kurangnya keseriusan pemerintah pusat, hingga kurangnya sosialisasi yang dilakukan tim pengagas pemekaran kepada masyarakat. Adanya penolakan usul inisiatif DPR RI tentang RUU pemekaran provinsi baru ABAS. Adanya anggapan pemekaran ini akan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat pro pemekaran dan kontra pemekaran dan keterlambatan pembangunan ekonomi dan SDM yang menjadi alasan gagalnya pemekaran di wilayah ini.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah Aceh harus lebih banyak mendengarkan keluhan permasalahan kesejahteraan yang terjadi di daerah-daerah serta harus lebih memperhatikan kondisi ALA dan ABAS kedepannya.
2. Tim pengagas pemekaran harus lebih serius melaksanakan lobi-lobi politik ke stakeholders terkait, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan pemekaran ke masyarakat, sehingga akan meningkatnya simpatisan yang mendukung pemekaran dan hilangnya stigma “elitis” dalam kebijakan pemekaran yang didengungkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007. *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah. Laporan Penelitian*. Jakarta: Direktorat Otda Bappenas.
- Baswedan Anies. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Jakarta.
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Bugin Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Fattah Hanurawan, 2010. *Psikologi Sosial : Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Frank Teroriero, 2006. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Kesatuan*. Malang: Setara Press.
- Koentjaraningrat, 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meiyanto, 2012. *Persepsi, Nilai dan Sikap*. Yogyakarta: UGM.
- Muluk M.R. Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing dan Center For Indonesia Reform.
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga.
- Mulyana, 2003. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Hadari. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nurbaya Siti. 2009. *Problematika Politik Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sanafiah Faisal. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarlito W Sarwono, 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Suharto, 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.

Solly M. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumi.

Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.

Walgito, 2004. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.

Zuriah Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal:

Afrijal, 2018. *Pandangan Masyarakat Aceh Jaya Terhadap Rencana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)*. Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2018.

Hanafi, M. Sahlan. 2013. *Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Perjanjian Helsinki* Dalam jurnal Walisongo. No. 1 Volume 2.

Herman Kombuno, *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Pemekaran Daerah, No. 2, 2017

Kumbono, Herman. 2014. *Pemekaran daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* Dalam Jurnal Pemekaran Daerah. No. 2.

Muttawali, 2017. *Penggabungan Provinsi Usulan ALA dan ABAS Menjadi ALABAS (Studi Persepsi Mahasiswa Unsyiah yang berasal dari ALA dan ABAS)*. Banda Aceh: Unsyiah.

Puspita, 2017. *Proses Persepsi Diri Mahasiswi Dalam Berbusana Muslimah*, Jurnal Pemikiran Islam Volume 41 Nomor 2, Pekanbaru: Universitas Riau.

Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015

Tabloid Berita. 2008. *Kontras* '. No. 422. Th. X. 31.

Peraturan Perundang Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Website:

<http://aceh.tribunnews.com>. hanya-ala-abas-solusinya, (diakses pada tanggal 20 Mei 2019).

www.liputan6.com/view/html, (diakses pada tanggal 20 Mei 2019).

<https://kbbi.web.id/dinamika> 13 desember 2017

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang wacana pemekaran Provinsi Ala Abas?
2. Siapakah tokoh pergerakan pencetus Ala Abas?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui latar belakang lahirnya pemekaran Provinsi Ala Abas?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga munculnya wacana pemekaran Provinsi Ala Abas?
5. Secara umum bagaimana menurut Bapak/Ibu manfaat pemekaran Ala Abas terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan?
6. Secara umum menurut Bapak/Ibu bagaimana perkembangan pembangunan dan perekonomian di Aceh Selatan apabila wacana pemekaran Provinsi Ala Abas terwujud nantinya?
7. Apakah masyarakat Aceh Selatan memerlukan pemekaran Provinsi Ala Abas tersebut?
8. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah wacana pemekaran Provinsi Ala Abas tersebut menjadi kepentingan masyarakat, ataukah menjadi kepentingan suatu kelompok?
9. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan usulan wacana pemekaran Provinsi Ala Abas?
10. Apakah menurut Bapak/Ibu pemekaran Provinsi Ala Abas layak untuk di mekarkan?
11. Apakah Bapak/Ibu yakin wacana pemekaran Provinsi Ala Abas tersebut akan terwujud nantinya?
12. Bagaimana peran pemerintah Aceh Selatan terhadap wacana pemekaran Provinsi Ala Abas?
13. Apa yang menyebabkan wacana pemekaran Provinsi Ala Abas belum terwujud sampai saat ini?